

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang lainnya. Kemiskinan ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan di masyarakat. Oleh karena itu, fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu masalah pokok bangsa, di mana penanggulangannya tidak dapat dipandang sebelah mata dan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di negeri ini.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 meningkat 0,56 persen dibanding pada September 2019. Jika dikonversikan ke dalam angka, kemiskinan pada Maret 2020 meningkat 1,63 juta orang dibanding pada September 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,- kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).²

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi ekonomi sehari-harinya, yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup di masyarakat. Dalam arti yang lebih mudah dipahami, kemiskinan merupakan sebagai suatu tanda maupun keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang kekurangan

¹ Alfatih S. Manggabarani, dkk, "*Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi Masyarakat Miskin di Kota Bekasi*", Jurnal Sembadha Vol. 1 No. 1, 2018, hal.231.

² Badan Pusat Statistik, "*Profil Kemiskinan di Indonesia*", Berita Resmi Statistik 56, 2019, hal.1 (diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>).

uang dan barang dalam menjamin keberlangsungan hidup keseharian mereka. Menurut *World Bank*, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan tingkat kesehatan serta pendidikan yang memungkinkan. Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidaklah memadai. Kemiskinan disebut sebagai masalah sosial, bahkan dikategorikan sebagai masalah sosial yang paling rumit dan sulit diselesaikan, karena kemiskinan mendatangkan berbagai masalah lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tampak jelas dari fakta-fakta yang ada bahwa sebagian besar kejahatan yang terjadi di masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung merupakan masalah yang diciptakan dari kemiskinan. Misalnya saja kasus pencurian dan perampokan, keduanya terkait langsung dengan masalah kemiskinan. Sedangkan kasus pengangguran dan kondisi kesehatan yang buruk dengan segala konsekuensinya merupakan masalah yang secara tidak langsung yang diciptakan dari kemiskinan. Sebab masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan pendidikan yang memadai dan makanan yang bergizi.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, dan upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satu aspek penting yang seharusnya dijadikan tolak ukur dalam mencapai kesejahteraan rakyat.³

Menurut penyebabnya, kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua model. Pertama, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang

³ Reza Attabiurrobby Annur, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*", *Economics Development Analysis Journal* Vol. 2 No. 4, 2013, hal.411.

diakibatkan oleh perencanaan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan (pemerintah), sehingga masyarakat miskin tidak mampu mengubah kehidupannya. Mereka hidup dalam kemiskinan yang konstan. Kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal, di mana masyarakat miskin itu sendiri sulit mencapai aktualisasi atas dirinya. Maka dari itu, banyak program dan model pemberdayaan yang diterbitkan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan mereka.

Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan yang memerlukan upaya komprehensif dalam pemberantasannya, karena kemiskinan kultural sangat berhubungan erat dengan model kehidupan yang telah menjadi rutinitas bahkan diyakini sebagai nasib turun-temurun dari nenek moyang. Namun berbeda halnya dengan kemiskinan kultural yang dihadirkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis sering dijumpai dengan singkatan gepeng, dan gepeng merupakan kelompok yang termasuk ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kemiskinan yang masih melanda para gelandangan dan pengemis merupakan tradisi buruk yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Namun, karena keterbatasan keuangan keluarga, para gelandangan dan pengemis rela bekerja keras untuk mendapatkan uang. Selain mengemis, banyak penghuni kawasan kumuh yang mencari nafkah dengan cara penipuan, perampokan, dan sejenisnya. Hal-hal yang memungkinkan dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat, menjadikan pengagasan suatu program pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Kemunculan gepeng di tengah-tengah masyarakat tentunya didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kemunculan gepeng merupakan suatu bekal untuk kajian yang kuat atas penanggulangan

gepeng, sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat dalam bentuk suatu model pencerahan untuk menanggulangi bertambahnya gepeng dalam jangka panjang.⁴

Dari waktu ke waktu, terjadi peningkatan jumlah gepeng yang berkeliaran di berbagai tempat. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah Kota Bekasi melakukan koordinasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Kepolisian.⁵ Salah satu sentra terpadu rehabilitasi sosial yang menangani penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Indonesia di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, berganti nama sejak Maret 2022. Sebelumnya sentra terpadu ini bernama Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur. Sentra terpadu yang menginduk pada Kementerian Sosial Republik Indonesia ini memiliki tugas dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada gelandangan dan pengemis, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.⁶

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi mendapatkan para gelandangan dan pengemis (atau biasa disebut gepeng) melalui operasi razia (penjaringan) yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bekasi maupun dari beberapa elemen di masyarakat. Penjaringan tersebut dilakukan di

⁴ Zainal Fadri, "*Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Yogyakarta*", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, 2019, hal.2-3.

⁵ Abdul Malik Iskandar dan Harifuddin Halim, "*Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Studi Kasus di Perumahan BTP Tamalanrea)*", Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2, 2019, hal.143-144.

⁶ *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*, hal.3.

titik-titik rawan gepeng, seperti jalan-jalan besar di sekitar Kota Bekasi. Fakta yang ditemukan setelah dilakukannya penjarangan ialah mayoritas para gepeng (atau yang kemudian disebut dengan penerima manfaat) tidak berdomisili di Kota Bekasi, melainkan kebanyakan dari mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Selain gepeng, terdapat beberapa kelompok yang termasuk ke dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan di dalam Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) merupakan salah satu program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dijalankan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam menanggulangi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, yang berbunyi: *“Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas”*.⁷

Melalui ATENSI, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi menjalankan dua program pemberdayaan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yakni program kewirausahaan dan keterampilan vokasional. Melalui dua program ini, para penerima manfaat diharapkan dapat menjalankan roda perekonomiannya secara mandiri di dalam sentra terpadu maupun setelah keluar dari sentra terpadu.

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, hal.2-3.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik menuliskan penelitian dengan judul **“Peran Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Melalui Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) Kewirausahaan dan Keterampilan Vokasional”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)?
2. Bagaimana tahapan serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Untuk mengetahui tahapan serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai program Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial) yang dilakukan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

a. Bagi Peneliti

Agar penulis atau peneliti dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal pengembangan masyarakat islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi selaku pemberi pelayanan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dalam kegiatan pemberdayaan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di kalangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis menulis penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun artikel jurnal yang menjadi bahan perbandingan untuk penelitian ini. Setelah penulis membaca, mempelajari, dan mengkaji karya ilmiah yang telah tersedia, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah berikut:

Pertama, skripsi Aji Dewantoro (2019) yang berjudul “Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Pengemis di Kota Tangerang”, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.⁸ Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi strategi dinas sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Tangerang. Penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan hasil temuan dari skripsi yang dikaji. Teknis pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang belum berjalan efektif, dikarenakan tidak tersedianya balai rehabilitasi sosial di Kota Tangerang. Berbeda dengan teknis pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, secara prosedur maupun anggaran telah dilakukan dengan manajemen yang lumayan baik. Adapun kesamaan yang penulis temui ialah terdapat kelemahan dari proses pelaksanaan program Dinas Sosial Kota Tangerang dalam menangani masalah kemiskinan, yaitu kurangnya manajerial *follow-up* yang diterapkan. Akibatnya gelandangan dan pengemis yang telah diberdayakan banyak yang kembali menggelandang di jalanan.

Kedua, skripsi Amelda Tiara Citra (2020) yang berjudul “Pemberdayaan dalam Program Terapi Psikososial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi”, di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan dalam program terapi psikososial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur

⁸ Aji Dewantoro, Skripsi: "*Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Pengemis di Kota Tangerang*" (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), hal.124.

⁹ Amelda Tiara Citra, Skripsi: "*Pemberdayaan dalam Program Terapi Psikososial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi*" (Jakarta: UIN Jakarta, 2020), hal.137.

Bekasi (sekarang Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi). Fakta menarik ditemukan bahwa tempat penelitian penulis sama-sama dilakukan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Namun terdapat perbedaan program pemberdayaan yang dibahas, yakni penelitian tersebut lebih meneliti pelayanan terapi (secara psikis) yang diberikan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Sedangkan yang penulis teliti ialah proses serta manfaat program-program pemberdayaan sentra terpadu itu sendiri, yang lebih berdampak pada individu penerima manfaat secara finansial (dalam hal ini kemandirian ekonomi).

Ketiga, artikel jurnal Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi (2016) yang berjudul “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis”, di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Madiun.¹⁰ Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk memaparkan permasalahan umum yang terjadi pada gelandangan dan pengemis. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah terdapat beberapa pokok permasalahan yang dialami oleh para gelandangan dan pengemis yang ada di Madiun serta sumber masalah yang dialami oleh warga binaan berkaitan dengan mental yang tidak sehat, yaitu adanya sikap malas dan tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, menginginkan sesuatu yang instan, dan kemampuan resiliensi yang rendah. Dalam hal ini penelitian memiliki kesamaan dalam penemuan hasil, yaitu faktor penghambat program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh kedua tempat rehabilitasi sosial. Namun penelitian yang dilakukan di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis tidak

¹⁰ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, *"Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis"*, Jurnal Ilmiah Psikologi Vol. 7 No. 1, 2016, hal.39.

mengklasifikasikan antara faktor internal dengan faktor eksternal penghambat program rehabilitasi yang dilaksanakan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan/atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan memiliki peran yang sama.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan serangkaian rancangan atau aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Dalam hal ini, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi memiliki peran dalam pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mencapai suatu peningkatan kapasitas kemampuan dan minat bakat serta ekonomi mereka (para

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJDM Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 4 No. 48, 2017, hal.2-3.

penerima manfaat) melalui program Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) kewirausahaan dan keterampilan vokasional.

2. Pengertian Asistensi Rehabilitas Sosial

Asistensi adalah suatu proses bimbingan pada suatu hal tertentu. Asistensi memberikan keuntungan kepada seseorang untuk dapat berinteraksi secara bebas. Sehingga asistensi dapat berpengaruh pada kualitas seseorang. Konsep asistensi adalah dengan memberikan kepercayaan kepada seseorang dalam hal ini adalah gelandangan dan pengemis untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan mereka dengan bantuan oleh pendamping (dalam hal ini balai rehabilitasi sosial) untuk mencapai tujuan.¹²

Rehabilitas adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses re-fungsionalisasi dan pengembangan kapasitas bagi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹³

Yang dimaksud dengan Asistensi Rehabilitasi Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagai berikut: *“Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui*

¹² Farid Helmi Setyawan, dkk, "Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Metode Asistensi dalam Mencegah Burnout Pasca Sertifikasi", Prosiding Profesionalisme Guru Abad XXI, 2018, hal.231.

¹³ Rayanis Maria Ulfa, Skripsi: "Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang Tahun 2011-2014" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), hal.5-6.

*kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas”.*¹⁴

Dalam hal ini, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi memberi ATENSI kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan kewirausahaan dan keterampilan vokasional.

3. Pengertian Kewirausahaan

Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata “wira” dan “usaha”. “Wira” berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan “usaha” berarti perbuatan, amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta akhirnya memasarkannya.¹⁵

Menurut Wennekers dan Thurik, kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan nyata seorang individu, yang berasal dari diri mereka, baik tim di dalam maupun di luar organisasi yang ada untuk menemukan peluang ekonomi baru, yang meliputi produk, metode produksi, skema organisasi, dan kombinasi barang-pasar, serta untuk memperkenalkan ide-ide mereka di pasar. Selain menekankan pada penciptaan hal-hal baru dan risiko, definisi yang dikemukakan oleh Wennekers dan Thurik juga menekankan pada

¹⁴ *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, ...hal.2-3.*

¹⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alvabeta, 2010), h.51.

kemauan dan kemampuan individu. Hal tersebut sejalan dengan definisi kewirausahaan yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.¹⁶

Dalam hal ini, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diberdayakan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi melalui ATENSI kewirausahaan. Adapun kewirausahaan itu sendiri memiliki beberapa pokja (kelompok kerja) yang nantinya akan dipilih oleh para penerima manfaat (dijelaskan pada bab II dan bab IV).

4. Pengertian Keterampilan Vokasional

Keterampilan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan praktik. Keterampilan vokasional merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan antara teori dan praktik dengan tujuan mempersiapkan individu agar terampil dalam bidang tertentu (sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya) agar dapat berkompetisi di dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri.¹⁷

Munurut Ishartiwi, kecakapan hidup diperlukan oleh setiap individu dalam upaya kelangsungan hidupnya. Kecakapan hidup tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai salah satu keterampilan yang dikembangkan melalui belajar.¹⁸

Dalam hal ini, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diberdayakan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi

¹⁶ Ahmad Rusdiana, *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal.45.

¹⁷ Lina Afriliani, Skripsi: *"Fungsi Bimbingan Keterampilan Vokasional (Vocational Skill) bagi Penyandang Disabilitas Netra"*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hal.46.

¹⁸ Hendra Jaya, *Keterampilan Vokasional bagi Anak Berkebutuhan Khusus "Perawatan dan Perbaikan Alat Elektronika"*, (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2017), hal.81.

melalui ATENSI keterampilan vokasional. Adapun keterampilan vokasional itu sendiri memiliki beberapa pokja (kelompok kerja) yang nantinya akan dipilih oleh para penerima manfaat sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakatnya masing-masing (dijelaskan pada bab II dan bab IV).

5. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Payne, pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial. Selain itu, makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas, di mana pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri.¹⁹ Dari segi bahasa, pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha. Anwas menyebutkan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*).²⁰

Menurut Susiladiaharti dalam Jurnal LSPS Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam lima tingkatan, yakni: (1) terpenuhinya kebutuhan dasar; (2) terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik; (3) kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya; (4) mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas; serta (5) kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan itu

¹⁹ Dede Mardani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman: Deepublis, 2019), h.30.

²⁰ Mustangin, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji", *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* Vol. 2 No. 1, 2017, hal.63.

sendiri harus melalui tahapan-tahapan intervensi guna program-program pemberdayaan dapat berjalan dengan semestinya.²¹

Dalam penelitian ini, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi menggunakan pendekatan pemberdayaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dikemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari program pengentasan kemiskinan di suatu balai, melainkan mereka dijadikan sebagai subjek utama dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: (1) upaya itu harus terarah; (2) program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran; dan (3) menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.²²

6. Pengertian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

²¹ BPPPS Kemensos, *'Pemberdayaan'*, Jurnal Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, 2020, hal.5-14.

²² Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal.15.

Adapun yang termasuk ke dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain: (1) anak balita terlantar; (2) anak terlantar; (3) anak yang berhadapan dengan hukum; (4) anak jalanan; (5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK); (6) anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; (7) anak yang memerlukan perlindungan khusus; (8) lanjut usia terlantar; (9) penyandang disabilitas; (10) tuna susila; (11) gelandangan; (12) pengemis; (13) pemulung; (14) kelompok minoritas; (15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasasyarakatan (BWBLP); (16) orang dengan HIV/AIDS (ODHA); (17) korban penyalahgunaan NAPZA; (18) korban *trafficking*; (19) korban tindak kekerasan; (20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); (21) korban bencana alam; (22) korban bencana sosial; (23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE); (24) fakir miskin; (25) keluarga bermasalah sosial psikologis; serta (26) komunitas adat terpencil.²³

Adapun kelompok PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan melalui ATENSI kewirausahaan dan keterampilan vokasional di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, mencakup: lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, pemulung, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikannya suatu pengetahuan tertentu sehingga

²³ BPPPS Kemensos, '*Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*', Jurnal Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS), 2020, hal.2-12.

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Semua riset pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memecahkan masalah.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis/metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut.²⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis memberikan gambaran serta analisis terkait peran Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) kewirausahaan dan keterampilan vokasional.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang penulis tentukan berkisar antara bulan April hingga Juni 2022. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis tentukan berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penulis melakukan penelitian terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan oleh Sentra Terpadu

²⁴ Nana Darna dan Elin Herlina, "*Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen*", Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5 No. 1, 2018, hal.288.

²⁵ Wiwin Yuliani, "*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*", Quanta Vol. 2 No. 2, 2019, hal.86.

Pangudi Luhur Bekasi, di bawah pengawasan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian, sebab teknik pengumpulan data akan menjadikan penelitian dengan memiliki kredibilitas tinggi.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bentuk atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilaksanakan di suatu tempat atau pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁷

Dari hasil observasi ini, penulis melakukan pengamatan dan mencatat apa saja yang akan menjadi objek penelitian, yakni program pemberdayaan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan proses tanya dan jawab serta saling bertatap muka antara dua orang atau lebih, dengan menggunakan alat pendukung yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), seperti susunan pertanyaan dan alat perekam suara.²⁸

²⁶ Wiwin Yuliani, ...hal.87.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2006), hal.184.

²⁸ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal.194.

Adapun yang menjadi responden saat wawancara, antara lain: satu orang Subag Tata Usaha, satu orang penyuluh sosial, empat orang pekerja sosial, dua orang instruktur, serta sebelas orang penerima manfaat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Wawancara dilakukan dengan mencatat dan merekam isi pembicaraan terkait objek penelitian, kemudian setelah dari pada itu dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data yang telah tersedia dalam bentuk catatan dokumen, yaitu untuk mencari data mengenai hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁹

Dokumentasi yang didapat dari penelitian ini berupa arsip, foto, dan bukti rekaman.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai sumber data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi.³⁰

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi serta wawancara secara langsung.

²⁹ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.158.

³⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal.103.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlaku.³¹

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen terkait objek penelitian berupa beberapa buku, skripsi, jurnal, artikel, maupun perundang-undangan.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³²

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³³

Dari penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian berupa kegiatan dari kewirausahaan dan keterampilan vokasional yang dijalankan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

³¹ Hardani, ...hal.104.

³² Hardani, ...hal.161-162.

³³ Hardani, ...hal.164.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.³⁴

Dari penelitian ini, penulis menyajikan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian berupa uraian-uraian seputar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*), dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*).³⁵

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan data-data yang telah tersedia maupun yang diperoleh dari lapangan. Setelah terkumpul, data-data yang diperoleh kemudian dianalisis agar masalah yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

³⁴ Hardani, ...hal.167.

³⁵ Hardani, ...hal.172.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi sejarah, profil, visi dan misi, program, sasaran, fasilitas, serta sumber pendanaan yang dijalankan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

BAB III menjelaskan tentang kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dijalankan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang akan diuraikan sebagai pembahasan penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi kondisi pendidikan, ekonomi, dan sosial para penerima manfaat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

BAB IV menjelaskan tentang pelaksanaan ATENSI dalam pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi peran, tahapan, proses, manfaat, serta faktor pendukung dan penghambat program ATENSI yang dilaksanakan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah dan saran-saran atau rekomendasi.